



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN LEGISLATIVE DRAFTING TRAINING





LATAR

Peraturan yang baik akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat/kelompok yang diaturnya. Ciri dari sebuah peraturan yang baik di antaranya adalah dapat menyelesaikan situasi sosial, mengubah perilaku, dan dapat memberikan ruang komunikasi bagi kelompok sasaran.

Terkadang dalam praktiknya, negara bukannya mendorong, memfasilitasi, dan membantu masyarakat untuk berkembang, namun malah sebaliknya. Peraturan yang dihasilkan malah memberangus hak masyarakat dan semakin menepikan kelompok warga yang memiliki keterbatasan akses sumber daya secara politik, sosial, dan ekonomi seperti perempuan, anak, warga miskin, masyarakat adat dan sebagainya. Sedangkan dalam perusahaan/organisasi, peraturan yang tidak tepat sasaran akan membatasi ruang gerak dan kreativitas bahkan sering kali menjadi sumber konflik internal.

Tantangan bagi setiap pembentuk peraturan adalah bagaimana membuat aturan yang dicerna dan tidak multiinterpretasi. Menyusun sebuah peraturan yang baik membutuhkan keterampilan yang memadai untuk mengenali masalah yang ingin diselesaikan. Dari sini kita dapat memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan. Kemampuan untuk mengenali masalah serta melakukan analisis seringkali sulit dilakukan karena ketiadaan *tools* dan metode yang memadai. Padahal kesalahan memberikan rekomendasi aturan bisa berakibat fatal bagi masyarakat.

Berangkat dari tantangan di atas, dibutuhkan keahlian dari para perancang peraturan agar aturan yang mereka buat dapat tepat sasaran dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Karenanya pembentuk peraturan selayaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang metode penyusunan peraturan yang baik sehingga peraturan yang dihasilkan mampu menyelesaikan masalah yang ada dan mendukung pemberdayaan masyarakat/perusahaan/organisasinya.



TUJUAN



Memberikan pemahaman teknis dan praktik perancangan peraturan untuk peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan maupun peraturan organisasi/ lembaga.



Memberikan keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa yang jelas, konsisten, dan mudah dimengerti.



Memberikan ruang untuk saling bertukar pengetahuan terkait kendala dan tantangan dalam penyusunan peraturan.



Otak Kiri

Otak Kanan

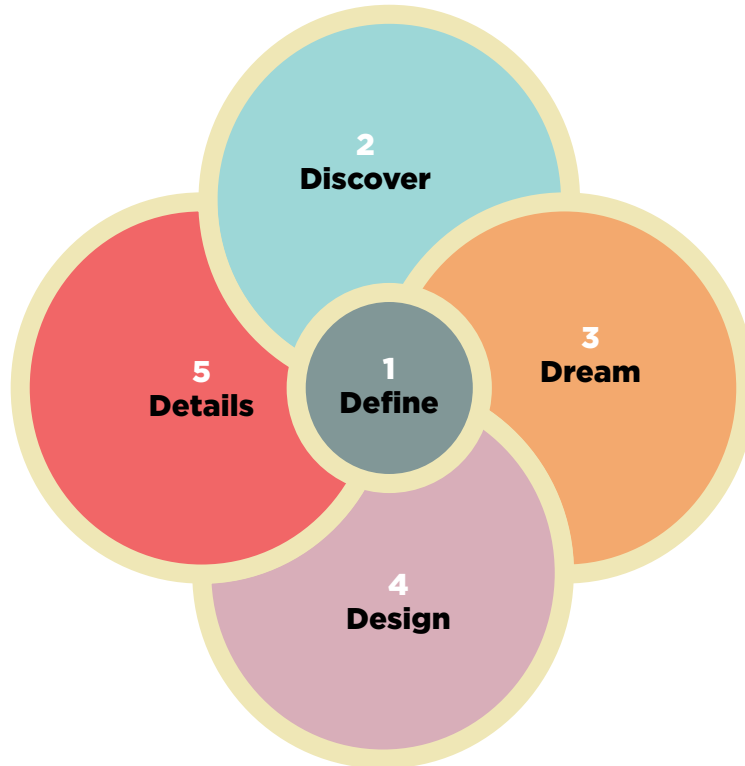


KONSEP

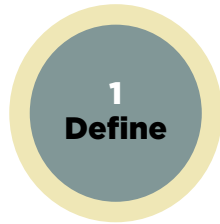
Dalam memberikan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan, Jentera menggunakan konsep *accelerated learning* (cara belajar yang dipercepat). Pelatihan tidak hanya mengasah ketajaman otak kiri, tetapi juga kreativitas otak kanan.

Setiap sesi akan dipandu oleh seorang *trainer* utama dan fasilitator yang akan memastikan proses pelatihan dan diskusi berjalan dengan baik.

ALUR DAN PENDEKATAN



**Alur pelatihan mengadopsi pendekatan
Appreciative Inquiry yang terdiri dari
Define, Discover, Dream, Design, Details.**



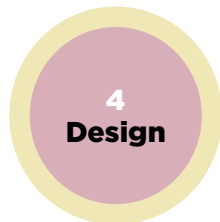
Pada tahapan Define, peserta mendapatkan materi tentang *context based legislation metode*, yaitu metode yang menggabungkan antara kekuatan data empiris dan visi.



Dalam tahapan Discover, peserta melakukan analisis situasi sosial dengan menggunakan pisau analisis yang disebut ROCCPI.



Setelah itu, peserta masuk dalam tahapan Dream, yaitu mencari visi dari peraturan perundang-undangan yang akan dirancang berdasarkan aset yang dimiliki.



Dalam tahapan Design dan Details, peserta mendapatkan materi tentang teknis perancangan peraturan. Materi terdiri dari teknik mengelompokkan aturan serta bahasa perundang-undangan. Peserta juga menyusun sebuah rancangan peraturan secara utuh.





MATERI PELATIHAN

Pelatihan Perancangan Peraturan STH Indonesia Jentera secara garis besar terdiri dari Teori, Metodologi dan Teknis Perancangan yang bisa di detailkan sebagai berikut.

Kedalaman tiap-tiap materi akan/ dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga berdasarkan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) yang dilakukan Jentera sebelum pelatihan.

PENGETAHUAN DASAR/TEORI

- Legislasi Berdasarkan Konteks (*context based legislation*)
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

METODE PERANCANGAN

- Menentukan Situasi Sosial
- Menentukan Tujuan Peraturan
- Menyusun Design Peraturan

PENGETAHUAN TEKNIS

- Sistematika Peraturan Perundang-undangan
- Kalimat perundang-undangan



PESERTA



**Idealnya dalam satu pelatihan,
peserta pelatihan berjumlah
antara 15 (lima belas) sampai
dengan 25 (dua puluh lima) orang.**

Pelatihan ini direkomendasikan untuk:

- **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),**
- **Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**
- **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
- **Tenaga Ahli (fraksi/alat kelengkapan) DPR/DPD/DPRD**
- **Biro/Bagian Hukum Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**
- **Divisi Hukum Perusahaan**
- **Perancang Peraturan**



MODUL PELATIHAN

Sejak 2003, Jentera dan PSHK telah mengembangkan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditandai dengan keseriusan PSHK mengeluarkan modul perancangan peraturan sebagai berikut.

- 1. Modul Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial.** Dicitak pada 2004 setelah melalui uji coba di empat provinsi di Indonesia, yaitu Lampung, Banjarmasin, Kendari, dan Mataram.
- 2. 9 Jurus Merancang Peraturan.** Merupakan hasil revisi atas modul yang diterbitkan pada 2004. Beberapa perubahan yang dilakukan dalam modul itu adalah metode pengemasan yang lebih banyak menggunakan gambar sehingga lebih mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- 3. Modul Perancangan Peraturan untuk Aceh.** Hasil kerjasama antara PSHK, Aceh Development Fund, Impact, dan dukungan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR NAD-Nias).
- 4. Merancang Peraturan untuk Perubahan.** Diterbitkan pada 2010, modul ini telah menerapkan context based legislation sebagai metode baru yang diperkenalkan PSHK. Modul itupun disertai dengan contoh alur training serta ilustrasi yang menarik.
- 5. Drafttology: Peraturan adalah Kabar Gembira.** Modul PSHK dan Jentera yang diterbitkan pada 2011. Modul itu sebagai penyempurnaan modul Merancang Peraturan Untuk Perubahan dari sisi pendekatan dan isi. Dengan menggunakan pendekatan Appreciative Inquiry, modul itu menambah dua tahapan yang sebelumnya tidak eksplisit dilakukan. Jadi modul itupun mulai memperkenalkan metode yang disebut *context-based legislative drafting*.

REKAM JEJAK PELATIHAN

Beberapa pelatihan perancangan peraturan yang pernah diselenggarakan oleh Jentera dan PSHK yaitu:

1. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan The World Bank, Yogyakarta Mei 2018.
2. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Komisi Pemilihan Umum, Maret 2018.
3. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Badan Ekonomi Kreatif, Maret 2016.
4. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Mei 2015.
5. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Mei 2015.
6. Pelatihan Perancangan Peraturan dan Penyusunan Kalimat Efektif bagi para Staf HR Danone Aqua pada Mei 2014.
7. Legal Officer Development Program bekerjasama dengan PT Astra International Tbk pada Februari – April 2014.

8. Pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPRD, pemerintah daerah, perancang daerah, dan Civil Society Organization (CSO) dari Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Sumba Barat (Nusa Tenggara Barat), Sumba Timur (Nusa Tenggara Barat), Jeneponto (Sulawesi Selatan), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Pelatihan itu diselenggarakan oleh The Asian Law Group, Hassall and Associates International, AusAid, dan Pemerintah Indonesia.
9. Pelatihan penyusunan peraturan untuk Bursa Efek Indonesia, April 2012.
10. Pelatihan Penyusunan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, 2012.
11. Pelatihan perancangan peraturan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012.
12. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Staf Komisi Yudisial pada 2011.
13. Pelatihan Penggunaan Metode untuk Menilai Rancangan Undang – Undang bagi Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas pada Februari 2011.
14. Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Direktorat Jenderal Pajak pada 2010, bekerja sama dengan Bagian Diklat Direktorat Jenderal Pajak;
15. Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi anggota DPR periode 2009—2014 pada Januari 2010; bekerja sama dengan Konrad Adenaur Stiftung (KAS);
16. Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bagi Anggota DPD pada Juli 2006; bekerja sama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP).

WAKTU DAN LOKASI

Kuta, Bali
12-16 Juni 2023
Senin-Jumat

Lokasi dan jadwal detail akan diinfokan kemudian
setelah peserta mengisi formulir pendaftaran

INVESTASI

**Investasi pelatihan ini adalah
sebesar Rp. 12.500.000/peserta**

***Early bird:*
Rp. 11.300.000/peserta
(s/d akhir April 2023)**

Peserta mendapatkan: Modul, sertifikat, training *kits* (tas, kaos, USB)
Biaya tersebut belum termasuk akomodasi selama pelatihan dan
transportasi menuju/dari lokasi pelatihan.

PENDAFTARAN

**Pendaftaran dapat
dilakukan dengan
mengisi formulir
pendaftaran via
barcode dibawah ini:**



SEKILAS STH INDONESIA JENTERA

Jentera [www.jentera.ac.id] didirikan oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), lembaga yang telah melahirkan lembaga penelitian dan advokasi hukum terkemuka Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK – www.pshk.or.id), portal hukum terdepan dan terlengkap hukumonline.com serta perpustakaan hukum Daniel S Lev [www.danlevlawlibrary.net].

Dengan tujuan mendorong tradisi baru pendidikan hukum, YSHK membangun Jentera berlandaskan modal pengetahuan, database, hasil penelitian, dan jaringan kerja yang telah terhimpun selama 13 tahun. Ide ini disambut antusias oleh berbagai kalangan yang memberi perhatian pada dinamika dunia hukum. Di antara yang berkomitmen untuk bergabung membangun sekolah ini adalah Marsilam Simanjuntak, Mardjono Reksodipoetro, Erman Rajaguguk, Arief Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Jentera bercita-cita menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang membangkitkan dan menantang mahasiswa dan pengajar untuk selalu mengembangkan ilmu yang didapat serta berkreasi dan berkontribusi pada dunia hukum Indonesia dan sebagai warga dunia. Lulusan yang diharapkan adalah yang mampu menggulirkan pembaruan hukum yang dinamis di ruang-ruang kerjanya, di jejaring profesinya, seiring tantangan jaman yang terus menerus berubah.

Saat ini, Jentera telah menyelenggarakan program studi Strata 1 (S1) mulai September 2015 setelah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) pada 10 Juni 2014. Selain itu, Jentera juga mengadakan berbagai pelatihan dan kursus untuk legislator, advokat, *in-house counsel*, profesional, aktivis sosial, dan mahasiswa. Di antara pelatihan yang rutin diselenggarakan oleh Jentera adalah Legislative Drafting Training dan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

KONTAK



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

DEVI RINAWATY

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-15
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980

Email : info@jentera.ac.id

Mobile : 0812 8452 2220

Phone : 62-21-830 2070

Fax : 62-21-8370 1810

Website: www.jentera.ac.id



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

www.jentera.ac.id